

POLITIK PERANAKAN TIONGHOA DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dian Festianto

Universitas Timor, Kefamenanu, Indonesia

Email: d_festianto@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penggunaan modalitas peranakan Tionghoa dalam ranah politik elektoral di Kabupaten Belu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus bersifat deskriptif analitis. Konsep modalitas dari Bourdieu penulis gunakan sebagai kerangka analisis. Penulis melakukan wawancara mendalam dengan politisi peranakan Tionghoa sebagai informan kunci dengan menggunakan teknik purposive sampling dan tim sukses sebagai informan tambahan. Pengolahan data penelitian menggunakan metode triangulasi untuk menjamin reabilitas, validitas, dan generabilitas. Hasil penelitian menunjukkan politisi peranakan Tionghoa melakukan konversi modal sosial dan modal ekonomi menjadi modal politik ke dalam tiga ranah secara bersamaan, yang pada akhirnya menghantarkan mereka menduduki jabatan politik baik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun kepala daerah. Fenomena demokratisasi lokal di Kabupaten Belu memiliki dua implikasi. Pertama; kondisi masyarakat local masih tradisional, berpendidikan rendah dan relatif miskin dan belum memiliki orientasi politik yang jelas cenderung mudah dimobilisasi oleh para politisi. Kedua, pada saat yang bersamaan partisipasi peranakan Tionghoa dalam ranah politik elektoral telah mewujudkan representasi politik substansi, karena kelompok minoritas terwakili dalam sistem politik formal. Untuk itu, regulasi tentang pembatasan biaya kampanye dan sanksi berat bagi politisi yang melakukan praktek pembelian suara sangat diperlukan guna mendukung penguatan substansi demokrasi di ranah lokal.

Kata Kunci: *Peranakan Tionghoa, modalitas, politik elektoral, demokratisasi lokal.*

PENDAHULUAN

Rekrutmen politik di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup mendasar pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Demokrasi elektoral sekedar

formalitas dalam pergantian jabatan politik secara perlahan bergeser lebih bebas, inklusif dan egaliter. Pergeseran dari kekuasaan yang sentralistik ke model demokrasi liberal menjadi

peluang dan daya dorong bagi peranakan Tionghoa terjun dalam politik elektoral setelah sebelumnya termarginalkan secara politik. Fenomena empiris menunjukkan sebagian peranakan Tionghoa di Kabupaten Belu telah bertransformasi dari ranah ekonomi menjadi elit politik lokal baik sebagai ketua partai politik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun kepala daerah. Keberhasilan mereka dalam dunia politik praktis tersebut menarik untuk dikaji, untuk itu pendekatan modalitas cukup relevan sebagai instrumen analisis terhadap fenomena tersebut.

Diskriminasi politik terhadap peranakan Tionghoa di Indonesia memiliki cerita sejarah yang cukup panjang. Sejak rezim Orde Lama sampai tumbanganya rezim Orde Baru, peran peranakan Tionghoa sebagai warga negara sangat terbatas. Ruang gerak mereka pada sektor perdagangan dan ekonomi yang diatur secara terbatas melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959 tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang Bersifat Asing Diluar Ibu Kota Daerah Swatantra Tingkat I dan II serta Karesidenan, karena berdasarkan regulasi yang ada saat itu mereka sulit dalam mengakses sektor politik dan cenderung diskriminatif. Lahirnya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina semakin

menunjukkan adanya upaya negara dalam mengubah identitas dan mengebiri hak-hak peranakan Tionghoa yang cenderung represif (Suryadinata, 2003: 2). Konsekuensinya, ranah politik yang seharusnya menjadi hak bagi setiap warga negara menjadi arena yang sulit ditembus bagi peranakan Tionghoa untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Memasuki era reformasi, melalui Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi maka negara menghapus penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Selanjutnya lahir Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dan melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek menunjukkan negara mengakui budaya Tionghoa sebagai bagian dari budaya bangsa Indonesia, yaitu menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional. Di bidang sosial politik pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Satya dan Maftuh, 2016: 12). Hal ini mempertegas komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum pada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis. Produk regulasi tersebut

membuka peluang etnis Tionghoa untuk melebarkan peran bukan saja dalam ranah ekonomi dan perdagangan, namun menjadi momentum bagi mereka terjun dalam dunia politik praktis. Hal ini ditandai mereka menjadi kontestan dalam politik elektoral di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Belu.

Fakta empirik menunjukkan setelah reformasi politisi peranakan Tionghoa di Kabupaten Belu cukup eksis dalam ranah politik elektoral. Sebut saja Joachim Lopez yang menjabat bupati selama dua periode dan Willybrodus Lay yang saat ini menjadi petahana kepala daerah. Selain itu, berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2019 jumlah politisi peranakan Tionghoa yang terpilih menjadi anggota DPRD di Kabupaten Belu sebanyak lima orang, dan menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan dari periode-periode sebelumnya.

Keberhasilan peranakan Tionghoa dalam dunia politik di Kabupaten Belu tidak terlepas dari kehidupan sosial mereka yang inklusif. Interaksi yang harmonis antara peranakan Tionghoa dengan masyarakat etnis lokal telah berlangsung turun-temurun. Perkawinan campur tersebut pada awalnya bermotif ekonomi, untuk mempermudah akses orang Tionghoa memperoleh kayu cendana sebagai komoditas perdagangan primadona saat itu. Dalam perjalanan waktu orang Tionghoa hidup menyebar

ke seluruh pelosok daratan Timor, sehingga di pulau Timor tidak ada perkampungan Cina yang bersifat eksklusif. Asimilasi budaya dengan motif kepentingan ekonomi tersebut pada dinamika politik kontemporer di Kabupaten Belu menjadi modal bagi politisi peranakan Tionghoa. Kesamaan identitas sebagai hasil konstruksi sosial secara turun-temurun pada akhirnya membantu mereka berhubungan dengan masyarakat lokal melalui jejaring karena mereka memiliki kesamaan nilai dengan masyarakat lokal, hal ini sebagai sumber daya dan dapat dipandang sebagai modal (Field, 2003: 224). Dengan demikian, dalam konteks kontemporer pilihan kawin masuk dan penggunaan marga lokal tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi peranakan Tionghoa yaitu untuk memperluas jaringan politik ketika mereka ikut berkontestasi dalam pemilihan umum pasca reformasi.

Keberhasilan strategi yang diterapkan peranakan Tionghoa sebenarnya tidak terlepas dari karakter masyarakat Timor yang masih tradisional yang mana dalam politik elektoral mereka cenderung membangun afiliasi politik dan memilih aktor politik berdasarkan pada kesamaan identitas. Fenomena politik menunjukkan bahwa peranakan Tionghoa cukup berhasil dalam mereproduksi identitas dan melakukan transformasi dari ranah sosial dan ekonomi ke ranah politik. Selama ini peranakan Tionghoa memiliki kuasa atas

perekonomian dan perdagangan di wilayah perbatasan Timor Barat. Meminjam konsep Casey (2005: 1-24) penguasaan ekonomi tersebut semakin menambah kekayaan pribadi yang menjadi potensi dalam ranah politik.

Berdasarkan fenomena politik tersebut kajian terhadap dinamika politik perananan Tionghoa dalam ranah politik elektoral di Kabupaten Belu penting dilaksanakan. Alasannya, sampai saat ini belum ada akademisi politik yang khusus mengkaji permasalahan ini, sehingga penelitian ini akan memberikan sumbangan bagi kemajuan studi perananan Tionghoa dalam demokratisasi lokal di wilayah perbatasan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan menjelaskan penggunaan modalitas politisi perananan Tionghoa dalam ranah politik elektoral di Kabupaten Belu.

KAJIAN PUSTAKA

Sejauh ini kajian tentang politikusan perananan Tionghoa di Indonesia relatif terbatas. Suharyanto (2014: 151-160) menemukan bahwa pada pemilihan kepala daerah di Kota Binjai tahun 2010 menunjukkan etnis Tionghoa memiliki partisipasi politik yang aktif karena adanya rasa simpati terhadap salah satu calon yang dinilai bisa mewakili mereka, hal ini berbanding terbalik dengan interaksi sosial sehari-hari yang cenderung eksklusif. Kajian ini terbatas pada bentuk partisipasi politik etnis

Tionghoa sebagai pemilih aktif walaupun dalam ranah sosial masih cenderung eksklusif.

Paramita (2016: 1-17) menemukan bahwa pada pemilihan umum 2014 di Jakarta calon anggota legislatif dari etnis Tionghoa kurang mendapatkan dukungan dari etnis Tionghoa di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, karena kurang percaya dengan kemampuan mereka dan beranggapan dunia politik tidak sesuai dengan karakter masyarakat etnis Tionghoa. Namun pada pemilihan gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2012 jumlah pemilih warga Tionghoa mencapai 100% karena saat itu yang menjadi calon wakil gubernur berasal dari etnis Tionghoa yang dinilai bisa merubah keadaan yang lebih mengakomodasi kepentingan etnis Tionghoa. Studi ini menempatkan etnis Tionghoa sebagai pemilih yaitu pada pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif di Jakarta.

Juliastutik (2010: 45-58) dalam studinya menemukan fenomena yang cukup menarik yaitu pada pemilu 2004 lebih dari 200 orang etnis Tionghoa di Makassar mencalonkan diri menjadi calon legislatif namun mereka hanya sekedar menjadi alat penghimpun suara dan dana oleh partai politik, sedangkan tahun 2009 mereka tidak hanya menjadi calon legislatif tetapi sudah berperan aktif dalam partai politik. Studi ini memang sudah mulai fokus pada perilaku politik praktis etnis Tionghoa

dalam ranah politik elektoral, namun hanya mengulas berdasarkan pada periodisasi pemilu.

Berdasarkan pemetaan pada penelitian terdahulu terdapat dua limitasi yang ditemukan, yaitu; 1) belum menempatkan etnis Tionghoa sebagai aktor politik yang berkontestasi langsung dalam pemilihan umum, dan 2) hanya mengkaji motif dan kecenderungan dalam menentukan pilihan politik etnis Tionghoa. Melengkapi kajian terhadap politik peranakan Tionghoa, penelitian ini menempatkan mereka sebagai aktor politik yang berkontestasi dalam pemilihan umum di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste. Untuk itu, konsep modalitas dari Bourdieu (1986) dalam Casey (2005) penulis gunakan sebagai kerangka analisis. Penulis hanya meminjam aspek modal ekonomi, modal sosial dan modal politik, karena modal budaya identik dengan modal sosial dalam kehidupan keseharian di lokasi penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus bersifat deskriptif analitis yang mana peneliti melakukan penyelidikan secara cermat suatu peristiwa, aktivitas atau proses sekelompok individu (Creswell, 2010: 20). Pilihan pendekatan ini dinilai paling tepat dalam menjelaskan bagaimana

dinamika politik calon anggota legislatif peranakan Tionghoa dalam merekonstruksi modalitas sebagai instrumen dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan membangun teori atau pola pengetahuan tertentu dengan mengeksplorasi dan memahami makna dari aktor (Creswell, 2010: 4) dengan menyajikan pandangan informan tentang fenomena yang terjadi sehari-hari sebagai sumber data (Yin, 2002: 18).

Penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan politisi peranakan Tionghoa sebagai informan kunci dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan tim sukses sebagai informan tambahan. Proses analisis data dengan cara memaknai dan memperdalam pemahaman mengenai data yang terkumpul, sehingga pembahasan penelitian ini tidak terlepas dari aspek lokasi penelitian, aktor, peristiwa dan proses (Creswell, 2010: 267). Pengolahan data penelitian menggunakan metode triangulasi dengan mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menghubungkan keterkaitan antar fenomena, setelah data-data dipelajari dan ditelaah selanjutnya dilakukan reduksi data untuk menarik kesimpulan (Moleong, 2001: 288), hal untuk menjamin reliabilitas, validitas, dan

generabilitas (Creswell, 2010: 284).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Singkat Peranakan Tionghoa di Kabupaten Belu

Kajian terhadap dinamika politik kontemporer peranakan Tionghoa di Kabupaten Belu tidak bisa dilepaskan dari aspek historis. Eksistensi mereka yang semula hanya bergerak di sektor ekonomi yang didukung dengan kepemilikan identitas ganda hanya bisa dipahami dengan perspektif sejarah. Hal ini karena kehidupan sosial budaya mereka cukup unik dan berbeda dengan kehidupan etnis Tionghoa di tempat lain di Indonesia yang cenderung eksklusif.

Purcell (1987: 52) dalam kajiannya menyatakan bahwa orang Tionghoa di Indonesia umumnya berasal dari suku-suku Hakka, Hainan, Hokkien, Kantonis, Hokchia dan Tiochiu. Namun, namun sejarah masuknya suku bangsa Tiongkok ke Pulau Timor belum diketahui secara pasti, karena minimnya catatan sejarah yang tersedia. Berdasarkan cerita dari para tokoh peranakan Tionghoa dan kajian Malagina (2019: 54-71) bangsa Tiongkok masuk ke Pulau Timor dimulai dengan aktivitas perdagangan kayu cendana dengan penduduk Pulau Timor sekitar abad ke-13. Pada saat itu, Atapupu telah digunakam oleh etnis Han sebagai basis perdagangan dan pemukiman mereka. Namun untuk memperoleh akses masuk ke daerah kayu cendana, mereka mulai berpindah

ke pedalaman dan menyebar ke seluruh tanah Timor. Untuk memperoleh jaminan keamanan dan mempermudah dalam penguasaan kayu cendana mereka mulai melakukan kawin campur dengan dengan perempuan dari keluarga raja-raja Timor dengan sistem kawin masuk (*oa' laen/matsao tam/tmafe tam*). Dengan demikian, mereka memperoleh nama keluarga bangsawan tersebut, seperti; Sally, Samara, Koliatin, Bitin Berek, Taolin, Puai, Halitaek, dan Tiwu. Selain itu, mereka juga mengambil nama-nama Portugis yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial di pulau Timor seperti Pareira, Lopez, Da Silva, dan Da Costa.

Selain institusi perkawinan, orang Cina di Timor juga memperoleh nama marga dari kalangan raja atau bangsawan karena proses pemberian oleh para raja di Timor. Berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat proses tersebut diawali ketika terjadi gejolak politik di Pulau Timor dan beberapa orang Cina saat itu datang menghadap raja-raja di Timor minta perlindungan. Untuk melindungi mereka, maka para raja memberikan nama marga kepada orang-orang Cina, secara tidak langsung maka mereka sudah menjadi keluarga raja dan bangsawan lokal. Status raja dan bangsawan yang melekat pada peranakan Tionghoa sampai saat ini masih melekat dan tetap ditaati oleh masyarakat lokal.

Proses asimilasi tersebut terjadi karena realitas sosial yang terjadi dalam rangkaian sejarah kehidupan orang Cina yang berinteraksi dengan masyarakat lokal yang berlangsung secara natural. Hubungan baik yang membentuk nilai-nilai modal sosial pada perjalanannya merupakan salah satu penopang bagi peranakan Tionghoa menjadi kekuatan ekonomi yang hegemonik di Pulau Timor. Hubungan baik tersebut terjalin melalui hubungan dagang yang dirintis oleh leluhur mereka. Rata-rata orang tua peranakan Tionghoa memiliki latar belakang pedagang hasil bumi. Untuk menjamin keselamatan dan pasokan padi, asam, mete dan lain sebagainya, mereka memanfaatkan status sosial mereka dan berkomunikasi dengan bahasa Dawan maupun Tetun. Hal ini dilakukan untuk memperoleh simpati dan mempermudah transaksi dalam negosiasi harga komoditas dengan masyarakat petani di pedesaan. Dengan demikian pola hubungan keluarga para politisi peranakan Tionghoa yang bergerak di sektor perdagangan memiliki hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat setempat.

Dalam perjalanan waktu, peranakan Tionghoa menjadi kekuatan ekonomi yang menguasai hampir seluruh kebutuhan masyarakat dan menjelma sebagai tuan tanah dan pedagang kaya di Kabupaten Belu. Mereka menguasai perdagangan, jasa konstruksi, jasa transportasi, perikanan, peternakan,

perkebunan dan pertanian. Mereka memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Belu. Untuk mempertahankan hegemoni ekonominya, mereka tetap mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal seperti berbahasa, bersikap dan bertindak layaknya orang Timor termasuk mengkonsumsi sirih pinang. Sirih pinang merupakan simbol untuk mempererat tali persaudaraan atau kekeluargaan. Bahkan dari pengakuan para informan, mereka lebih familiar disebut sebagai orang Timor dari pada sebagai orang Cina. Hal ini ditegaskan oleh politisi peranakan Tionghoa, Wilibrodus Lay yang menjabat Bupati Belu, anggota DPRD Belu Fabianus Juang dan Benediktus Manek.

2. Lokus Konversi Modalitas

Dalam politik elektoral, politisi akan melakukan berbagai macam strategi untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Salah satu strategi yang dilakukan oleh politisi peranakan Tionghoa di Kabupaten Belu melakukan konversi modal sosial dan modal ekonomi menjadi modal politik ke dalam tiga ranah secara bersamaan, yaitu; masyarakat umum, basis massa, dan partai politik. Konversi modalitas dalam pasar politik tersebut semakin masif menjelang pelaksanaan pemilihan umum, hal ini menunjukkan bahwa modalitas dimanfaatkan secara maksimal untuk menopang kerja-kerja politik peranakan Tionghoa dengan tujuan

memenangkan kontestasi pemilihan anggota legislatif tahun 2019 maupun pemilihan kepala daerah tahun 2015 lalu.

Eksistensi peranakan Tionghoa dalam dunia politik praktis tidak diperoleh secara instan, melainkan melalui proses yang sudah berlangsung turun-temurun dalam sektor sosial dan ekonomi. Hal ini diperkuat dengan fakta empirik yang menunjukkan dalam ranah masyarakat umum, mereka memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dan menampung komoditas pertanian dan perkebunan yang dihasilkan masyarakat lokal. Relasi demikian di satu sisi menciptakan relasi saling menguntungkan. Namun, di sisi lain sebenarnya telah terjadi ketimpangan karena ketergantungan sektor ekonomi masyarakat lokal terhadap peranakan Tionghoa semakin tinggi. Dalam perjalanan waktu, mereka telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi dan perdagangan yang cenderung hegemonik, yang mana menjadi salah satu penopang keberhasilan mereka dalam politik elektoral.

Selain itu, penggunaan marga lokal yang diperoleh melalui proses kawin campur atau pemberian para raja menjadi salah satu modal bagi peranakan Tionghoa untuk memperkuat identitas sebagai orang Timor. Dengan demikian, peranakan Tionghoa memiliki identitas ganda dalam waktu yang bersamaan yaitu identitas sebagai orang Cina dan identitas sebagai orang Timor. Hal ini

cukup menguntungkan ketika mereka memanfaatkannya dalam ranah politik elektoral. Atribut identitas lokal yang melekat pada politisi peranakan Tionghoa tersebut mempermudah mereka memperoleh dukungan dari para tokoh adat dan tokoh masyarakat. Mereka melakukan mobilisasi dukungan masyarakat dengan memanfaatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat sebagai penggalang suara. Strategi ini cukup ampuh dalam mengantarkan politisi peranakan Tionghoa memperoleh jabatan politik.

Uniknya, politisi peranakan Tionghoa di Kabupaten Belu tidak semuanya menjadi anggota paguyuban Tionghoa. Berdasarkan pengakuan politisi muda peranakan Tionghoa Fabianus Juang dan Benediktus Manek mengaku enggan bergabung dalam paguyuban Tionghoa karena dinilai kurang memberikan manfaat. Menurut pengakuan mereka, kebanyakan anggota paguyuban merupakan peranakan Tionghoa yang tergolong sudah tua. Mereka juga mengakui kurang efektif memanfaatkan komunitas Tionghoa sebagai basis dukungan politik, mengingat cukup banyak peranakan Tionghoa yang terjun dalam dunia politik. Mereka hanya memanfaatkan keluarga baik dari garis keturunan bapak atau ibu untuk memperoleh dukungan sekaligus menjadi bagian dari tim sukses mereka. Namun untuk menjaga silaturahmi diantara peranakan

Tionghoa, mereka mengaku pernah mengikuti kegiatan yang diadakan paguyuban Tionghoa seperti dalam acara tahun baru Cina (Imlek).

Dalam ranah basis massa, perananan Tionghoa memiliki keterikatan yang kuat dengan konstituennya. Politisi perananan Tionghoa memegang prinsip bahwa konstituen merupakan lumbung suara yang harus dijaga dan dirawat, karena pola hubungan tersebut dibangun atas dasar kepercayaan. Bagi Benediktus Manek dan Fabianus Juang mempertahankan kepercayaan tersebut harus dibayar dengan dukungan finansial yang tidak sedikit. Untuk itu, dukungan finansial menjadi kebutuhan mutlak bagi terjaminnya dukungan politik konstituen. Berdasarkan pengakuan informan, untuk mendukung ongkos politik tersebut ditopang dari usaha bisnis dan sumbangan yang berasal dari keluarga mereka. Berdasarkan pengakuan informan, mereka memberikan bantuan kepada konstituen dalam bentuk kedukaan, pesta maupun untuk kepentingan umum seperti acara adat, gotongroyong di tingkat desa, dan pembukaan jalan desa. Dengan demikian, penguasaan produksi dan finansial mudah dikonversikan ke dalam bentuk modal lain (Fauzi dalam Halim: 2018: 96). Bagi politisi perananan Tionghoa dunia politik tidak berbeda dengan dunia bisnis, keduanya penuh dengan persaingan yang tajam dan

membutuhkan investasi untuk memperoleh keuntungan. Untuk itu, politisi perananan Tionghoa menyebut bantuan-bantuan kepada konstituen sebagai investasi politik. Harapannya, ketika mereka mampu memenuhi permintaan konstituen maka imbalbalik yang akan diperoleh berupa bentuk dukungan konstituen dengan memilih mereka ketika pemilihan umum.

Pembentukan tim sukses dan para saksi di tempat pemungutan suara penulis kategorikan dalam ranah konstituen dengan pertimbangan personil keduanya berasal dari basis massa. Politisi perananan Tionghoa memilih tim sukses dari tokoh lokal yang memiliki pengaruh di masyarakat dan terbukti loyal. Tim sukses mereka rata-rata tidak lebih dari 10 orang, tetapi mereka memiliki jaringan yang cukup luas, baik di kalangan pemuda, masyarakat perkotaan maupun masyarakat di pedesaan. Sedangkan dalam pembuatan atribut kampanye, para informan hanya mencetak contoh kertas suara, karena dinilai lebih efektif dan bisa diproduksi sendiri dengan bantuan perangkat komputer yang mereka miliki. Hal ini mereka lakukan untuk menjelaskan dimana posisi foto mereka, nomor urut mereka dan nomor urut partai politik sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan ketika hendak mencoblos foto mereka yang tertera pada kertas suara. Mereka berpendapat pembuatan baliho dan spanduk dinilai tidak efektif, karena

pada dasarnya masyarakat sudah mengenal mereka. Mereka juga menambahkan yang menjadi problem terbesar dalam pemilihan anggota DPRD adalah kebingungan di tingkat masyarakat untuk menemukan kandidat pilihannya akibat banyaknya partai politik dan calon anggota legislatif.

Dengan demikian, kebutuhan finansial bisa dialihkan untuk keperluan operasional politik lainnya seperti; gaji bulanan tim sukses, pembelian sirih pinang, rokok, sopi, pembelian suara, dan mahar politik. Besaran biaya operasional tim sukses ini relatif kecil karena mereka tidak menuntut gaji bulanan. Namun diantara kandidat dengan tim sukses terjadi kesepakatan, jika kandidat terpilih maka anggota tim sukses akan memperoleh kompensasi tertentu. Untuk memperlancar komunikasi dengan masyarakat lokal, biasanya tim sukses selalu memberikan sirih pinang, sopi dan rokok kepada masyarakat maupun tua-tua adat sebagai sarana komunikasi politik. Dalam budaya lokal, ketika sirih pinang dan sopi telah diterima secara simbolis sudah tercipta adanya kontrak politik antara masyarakat dengan politisi peranakan Tionghoa. Sedangkan untuk pendekatan kepada para pemuda di kota Atambua, para informan mencoba memahami keinginan dan kebutuhan para pemuda tersebut. Misalnya, Fabianus Juang yang juga pengusaha kuliner merelakan rumah makannya sebagai rumah singgah bagi

para pemuda dengan menyiapkan makanan, minuman dan rokok secara gratis baik siang maupun tengah malam. Disaat para pemuda berkumpul tersebut informan dan tim suksesnya melakukan pendidikan politik, dan strategi ini terbukti efektif.

Berdasarkan pengakuan informan rata-rata ongkos politik yang dikeluarkan untuk mendukung operasional kampanye berkisar antara Rp200.000.000,00-Rp350.000.000,00. Namun, ketika penulis mengkonfirmasi kepada masyarakat pemilih di lokasi penelitian mereka mengaku bahwa besaran pembelian suara masyarakat menjelang hari pemilihan cukup bervariasi yaitu antara Rp200.000,00-Rp350.000,00 per suara. Namun, untuk pembelian suara tersebut, para informan tidak bersedia berkomentar karena hal ini dinilai sangat sensitif dan memiliki potensi pelanggaran terhadap aturan pemilihan umum.

Ada hal yang cukup menarik, untuk menekan biaya kampanye para informan dalam kampanye menggunakan sistem tandem. Mereka berkolaborasi dengan calon anggota legislatif pusat dengan mencetak kalender dan contoh kertas suara yang menampilkan foto kedua calon anggota legislatif. Selanjutnya, ketika kampanye politisi peranakan Tionghoa membantu mengkampanyekan calon anggota legislatif pusat tersebut ke konstituen. Adapun sebagian besar biaya yang

dibutuhkan untuk operasional kampanye ditanggung oleh calon anggota legislatif pusat. Dengan sistem ini maka mereka mampu menekan biaya politik yang cukup besar.

Berdasarkan pemetaan di lapangan, rata-rata para informan menduduki jabatan pada struktur elit partai politik di tingkat lokal. Kemampuan mereka menduduki posisi elit partai di tingkat lokal tidak terlepas dari keberanian mereka dalam mengambil keputusan untuk terjun dalam dunia politik yang selalu diwarnai dengan intensitas persaingan yang tinggi. Selain itu, mereka juga memiliki kelebihan dalam melakukan komunikasi dan lobi-lobi politik, yang mana model-model seperti ini sudah biasa mereka lakukan dalam ranah pemasaran. Mereka berasumsi dunia bisnis dengan dunia politik memiliki kemiripan karakteristik, karena keduanya selalu menghadirkan proses marketing, persaingan, penggunaan sumber daya yang terbatas, dan memiliki resiko kalah-menang. Ketika mereka mampu menguasai persaingan dalam dunia bisnis, mereka berpendapat bahwa terjun dalam dunia politik elektoral tidak membutuhkan penyesuaian yang besar. Hal ini disampaikan oleh para informan yang memiliki latar belakang keluarga sebagai pengusaha lokal. Mereka juga memiliki posisi pada struktur partai politik dimana politisi peranakan Tionghoa berafiliasi pada jabatan yang cukup strategis.

Masuknya politisi peranakan Tionghoa dalam jajaran elit partai otomatis mendapatkan dukungan pengurus partai dalam mencalonkan diri menjadi anggota legislatif maupun dalam menggerakkan mesin politik partai politik sampai ke tingkat paling bawah.

Adapun data mengenai mahar politik, penulis mengalami kesulitan memperoleh data empirik. Hal ini disebabkan tidak terbukanya para informan memberikan informasi terkait dengan sumbangan calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah kepada partai politik dimana mereka berafiliasi. Informasi yang mereka sampaikan relatif sama, yaitu tidak ada pungutan finansial oleh partai politik terhadap calon anggota legislatif.

3. Capaian Peranakan Tionghoa dalam Jabatan Politik

Praktek demokratisasi lokal di empat kabupaten yang berada di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste ditandai dengan eksisnya politisi peranakan Tionghoa dalam percaturan politik elektoral. Dalam konteks demokrasi perwakilan, keterlibatan peranakan Tionghoa menjadi kontestan dalam pemilihan anggota legislatif memberikan sumbangan terhadap terwujudnya keterwakilan minoritas dalam politik formal kenegaraan. Realitas selama Orde Lama dan Orde Baru, kebijakan politik ditandai dengan praktek-praktek politik diskriminatif yang tidak mampu

mengakomodasi kepentingan minoritas terutama dari kalangan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Dengan demikian reformasi bisa dikatakan sebagai tonggak bagi peranakan Tionghoa terlibat secara langsung dalam politik formal kenegaraan. Ketika peluang sudah terbuka, dan pada saat bersamaan dukungan modalitas yang dimiliki peranakan Tionghoa cukup besar, maka mereka memiliki peluang yang cukup besar pula untuk memenangkan kontestasi dalam pemilihan anggota legislatif di ranah lokal.

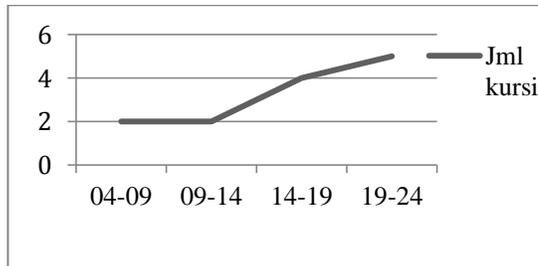
Sistem liberal demokrasi yang berlaku saat ini memberikan peluang bagi pemilik modal masuk dalam dunia politik. Sistem liberal demokrasi yang menghendaki adanya penciptaan elektabilitas hanya akan terwujud dengan dukungan modalitas yang besar dan itu dimiliki oleh politisi peranakan Tionghoa. Alokasi modal tersebut digunakan untuk keperluan memperoleh, memelihara dan memperluas konstituen sebagai basis massa. Secara rasional, penguasaan modalitas oleh politisi peranakan Tionghoa tersebut dalam pandangan Birner dan Wittmer (2014) memungkinkan aktor politik mengakumulasi menjadi modal politik dan menggunakannya secara efektif dalam politik elektoral. Dalam pandangan Lukmajati (2016) semakin banyak para kandidat menginvestasikan modal sosial, budaya dan ekonomi

dalam kampanye maka akan semakin banyak modal politik yang diperolehnya dan ini merupakan pintu masuk untuk merebut kekuasaan politik. Dengan demikian, walaupun peranakan Tionghoa merupakan etnis minoritas, tetapi mereka menjadi kekuatan ekonomi yang hegemonik dan menjelma menjadi elit ekonomi di Kabupaten Belu, ditambah lagi dengan kondisi kultur masyarakat Timor yang masih tradisional yang relatif mudah dimobilisasi menjadi stimulan bagi peranakan Tionghoa terjun dalam dunia politik dan hasilnya bisa dikatakan cukup berhasil.

Data empirik menunjukkan politisi peranakan Tionghoa telah menjadi elit politik dalam pemerintahan yang mana mereka mampu menjadi anggota legislatif di lokasi penelitian selama empat periode pemilihan umum pasca reformasi. Data pada grafik 1 menunjukkan pada periode 2019-2024 jumlah anggota legislatif di kabupaten Belu sebanyak lima orang dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Belu sebanyak 30 orang (16,67%). Hasil pemilu ini mengalami kenaikan satu kursi jika dibandingkan pada periode 2014-2019. Jika dilihat dari hasil pemilu tahun 2004, maka jumlah anggota DPRD dari peranakan Tionghoa mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan tren grafik tersebut kemungkinan politisi peranakan

Tionghoa yang akan terpilih pada pemilu ke depan akan mengalami kenaikan.

Grafik 1
Anggota DPRD Kabupaten Belu
Peranakan Tionghoa per Periode



Sumber: KPUD Belu diolah, 2019

Politisi peranakan Tionghoa di Kabupaten Belu tidak saja berhasil menjadi anggota DPRD, namun juga mampu menjadi kepala daerah selama tiga periode berturut-turut. Pada periode 2004-2009, Joachim Lopez menjadi bupati untuk periode pertama dan pada pemilihan kepala daerah tahun 2009 berhasil mempertahankan jabatannya untuk periode kedua. Joachim Lopez merupakan peranakan Tionghoa keturunan Cina-Hakka dari garis ibu kandung. Selanjutnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 salah satu peranakan Tionghoa Wilibrodus Lay yang berlatar belakang pengusaha kembali terpilih menjadi Bupati Belu untuk periode 2015-2020. Wilibrodus Lay berasal dari marga Lay yang merupakan salah satu subetnis dari etnis Hakka atau Han yang berasal dari Cina Utara.

Terlepas dari kuasa modal yang melekat pada politisi peranakan Tionghoa, kebangkitan mereka dalam politik lokal pasca reformasi memiliki dua makna strategis. Pertama, merupakan upaya peranakan Tionghoa dalam memperoleh pengakuan secara politis setelah sekian lama termarginalkan secara politik. Kedua, keberhasilan politisi peranakan Tionghoa menduduki jabatan publik sebagaimana konsep Pitkin (1967) dalam Ardi (2014: 308) mengarah pada perwujudan keterwakilan politik secara deskriptif, karena terakomodirnya keterwakilan politik dari berbagai kelompok warga negara dalam hal ini kelompok peranakan Tionghoa.

Dalam masyarakat modern yang sangat plural dan dinamis liberal demokrasi menjadi satu-satunya pilihan yang paling realistis dalam proses rekrutmen politik. Untuk itu, kebijakan politik lokal ini layak tetap dipertahankan karena pemilihan umum dalam masyarakat modern menjadi sarana pendidikan politik sekaligus sebagai upaya dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab untuk kemajuan daerah (Winengan, 2018: 61-73). Walaupun secara empirik dalam demokratisasi lokal ditemukan praktik-praktik yang cenderung tidak sesuai dengan nilai-nilai substansi demokrasi seperti pembelian suara, namun hal itu bukan menjadi

alasan untuk kembali kepada sistem sentralistik.

Keberhasilan politisi peranakan Tionghoa menjadi anggota DPRD dan kepala daerah, juga ditopang oleh jabatan mereka di dalam struktur partai politik dimana mereka berafiliasi. Masuknya peranakan Tionghoa menjadi pengurus partai politik untuk menjamin terakomodirnya berbagai jenis aspirasi yang datang dari masyarakat yang diwakilinya, karena dalam demokrasi kontemporer partai politik menjadi instrumen utama untuk mendapatkan kendali atas institusi-institusi politik (Pamungkas, 2011: 3). Beberapa politisi peranakan Tionghoa di Kabupaten Belu yang menjadi elit politik partai politik disajikan pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Posisi Politisi Peranakan Tionghoa pada Jabatan Struktur Partai Politik

No	Name	Jabatan
1	Wilbrodus Lay	Ketua Umum DPC Partai Demokrat Kabupaten Belu
2	Yohanes Juang	Pernah menjadi Ketua DPC PDIP Kabupaten Belu
3	Fabianus Juang	Pengurus DPC PDIP Kabupaten Belu
4	Benediktus Manek	Ketua Garda Pemuda Partai Nasional Demokrat Kabupaten Belu

Sumber: data primer diolah, 2019

Kebangkitan peranakan Tionghoa dalam dinamika politik lokal saat ini

tidak terlepas dari strategi politik yang mereka terapkan. Penguasaan modal sosial yang memberikan identitas ganda yaitu sebagai orang Tionghoa sekaligus sebagai orang Timor menjadi basis isu yang selalu diangkat ketika berkontestasi dalam pemilihan umum. Hal ini tidak mengejutkan, mengingat struktur etnis merupakan variabel penting bagi preferensi politik lokal (Rohi, 2015: 459), yang masih berciri tradisional pendidikan rendah dan relatif miskin, sehingga sentimen etnisitas memiliki pengaruh dalam pembentukan preferensi politik masyarakat. Ikatan etnis dan hubungan adat-istiadat (Rohi, 2015: 457) tetap menjadi pilihan utama dalam menentukan strategi kampanye politisi lokal. Meminjam konsep Hall (1996) dalam Lefaan (2012) batas-batas identitas yang melekat pada diri politikus peranakan Tionghoa di Timor bersifat konstruktivistik, dan bagi Reuter dalam Ishiyama dan Breuning (2013: 233) sebagai pandangan instrumental, karena bagi mereka identitas dimaknai sebagai instrumen mobilisasi massa untuk mencapai tujuan politik yaitu kekuasaan.

Selain memobilisasi modal sosial, politisi peranakan Tionghoa juga mengeluarkan modal ekonomi yang tidak sedikit. Meluasnya praktik pembelian suara baik dalam pemilihan kepala daerah maupun anggota legislatif tidak terlepas dari kondisi masyarakat yang tergolong miskin dan pragmatis.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2018) rata-rata pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Belu berkisar antara Rp300.000,00-Rp350.000,00 per bulan. Akibatnya, mobilisasi suara dengan kompensasi uang *cash* menjadi godaan yang sulit ditolak masyarakat. Berdasarkan temuan di lapangan, praktik pembelian suara berkisar antara Rp200.000,00-Rp350.000,00 per suara. Bisa dibayangkan jika dalam rumah tangga terdapat dua anggota keluarga yang memiliki hak suara maka mereka memperoleh kompensasi yang besarnya melebihi pendapatan mereka per bulan.

Penggunaan uang selain dalam bentuk *cash*, juga dikonversi dalam berbagai bentuk barang seperti sirih pinang, sopi (minuman tradisional yang mengandung alkohol), dan rokok. Dalam budaya lokal sirih pinang dan sopi merupakan simbol persaudaraan, kekeluargaan, dan bentuk penghormatan kepada orang yang dituakan. Ketika seseorang datang membawa sirih pinang dan sopi maka tuan rumah tidak akan menolak permintaan tamu tersebut. Proses ini sebagai tanda terjadinya kontrak politik dan bentuk dukungan masyarakat kepada politisi peranakan Tionghoa. Interaksi emosional antara peranakan Tionghoa dengan masyarakat lokal ini dalam istilah Lawyer dan Yon (1993, 1996) dalam Ritzer dan Smart (2011: 535) sebagai kerapatan relasional

(*relational cohesion*) yang ditandai dengan terbentuknya jejaring lokal sebagai *frame* referensi kesamaan identitas sosial (Leege dan Wald, 2007: 295-296). Dengan demikian, demokratisasi lokal di Kabupaten Belu memiliki karakteristik unik, yaitu eksistensi minoritas dalam politik elektoral. Peranakan Tionghoa cukup diuntungkan dengan kebijakan desentralisasi politik pasca reformasi dan lingkungan sosial budaya yang mendukung, sehingga dengan mobilisasi modalitas yang dimiliki peranakan Tionghoa mampu menjadi elit ekonomi bahkan sebagian menjadi elit politik di Kabupaten Belu.

KESIMPULAN

Kehidupan sosial peranakan Tionghoa di Kabupaten Belu cenderung bersifat inklusif sehingga mereka relatif mudah diterima oleh masyarakat yang pada akhirnya melahirkan budaya *hybrid*. Percampuran budaya dalam balutan motif ekonomi mengantarkan mereka menjadi kekuatan ekonomi yang dominan. Dalam sistem liberal demokrasi, kuasa modal peranakan Tionghoa tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menopang kerja-kerja politik. Mobilisasi dan konversi modalitas ke dalam ranah masyarakat umum, basis massa dan partai politik secara bersamaan ternyata cukup efektif dalam meningkatkan elektabilitas dan

memenangkan kontestasi dalam politik elektoral.

Fenomena penggunaan modalitas dalam demokratisasi lokal memiliki dua implikasi. Pertama, kondisi masyarakat lokal masih tradisional, berpendidikan rendah dan relatif miskin dan belum memiliki orientasi politik yang jelas cenderung mudah dimobilisasi oleh para politisi. Kedua, pada saat yang bersamaan partisipasi peranakan Tionghoa dalam ranah politik elektoral telah mewujudkan representasi politik substansi, karena kelompok minoritas terwakili dalam sistem politik formal.

Untuk penguatan substansi demokrasi di ranah lokal perlu adanya regulasi tentang pembatasan biaya kampanye yang semakin ketat dan sanksi yang semakin berat bagi politisi yang melakukan pembelian suara, sehingga pemilihan umum benar-benar sebagai wahana untuk menghasilkan pemimpin politik yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Ardi, A. M.(2014), *“Perempuan di Legislatif: Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur”*, Jurnal Politik Muda, Vol. 3, No. 3, pp. 303-318.

Birner, R. and Wittmer, H.(2014), *“Converting Social Capital into Political Capital. How do local communities gain political influence? A theoretical approach*

and empirical evidence from Thailand and Columbia”, The 8th Biennial Conference of the International Association for the Study of Common Property (IASCP), diakses dari <https://pdfs.semanticscholar.org/925d/bd4d9d7badcebbe5b8f42b3d53e5ccc15597.pdf>, pada 10 September 2019.

Casey, K. L.(2005), *“Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu’s Theory”*, Paper Presented at the Illinois State University Conference for Students of Political Science. University of Missouri-St. Louis, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/237710955_Defining_Political_Capital_A_Reconsideration_of_Bourdieu's_Interconvertibility_Theory/link/5b16bdda6fdcc6d3e04cb2b/download, pada 7 Oktober 2019.

Creswell, J. W.(2010), *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Third Edition. Translation: Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Field, J.(2003), *Social Capital*, London: Routledge.

- Halim, A.(2018), *Politik Lokal Aktor, Problem, dan Konflik dalam Arus Demokratisasi*, Malang: Intrans Publishing. 18, diakses dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/mip/article/view/2801/2328>, pada 13 Oktober 2019.
- Juliastutik (2010), “*Perilaku Elit Politik Etnis Tionghoa Pasca Reformasi*”, e-journal of *Humanity*, Vol. 6, No. 1, pp. 45-58, diakses dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/852/2971>, pada 13 Oktober 2019.
- Reuter, T. K.(2013), “*Konflik Etnis*”, in *Ishiyama, John, T. & Breuning, M. In Ishiyama, John T., & Breuning M. (Eds). Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad ke-21 Sebuah Referensi Panduan Tematis*, pp. 232-247, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Leege, D. C. Dan Kenneth D. W.(2007), “*Meaning, Cultural Symbols, and Campaign Strategies*”, in *Neumann W. R (et al)*, *The Affect Affect Dynamic of Emotion in Political Thinking and Behavior*, Chicago dan London: The University of Chicago Press.
- Lefaan, A. Et. al.(2012), “*Etnosentrisme dan Politik Representasi di Era Otonomi Khusus Papua*”, e-journal *Jurnal Majalah Ilmiah Pembelajaran*, special edition, 1-
- Lukmajati, D.(2016), “*Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014*”, *JournalPolitika*, Vol. 7 No. 1, pp. 138-159.
- Malagina, A.(2019), “*Cerita Orang Cina di Bumi Cendana*”, *Intisari*, edisi Januari, pp. 54-77.
- Mengkaka, B.(2019), “*Para Tokoh Marga Lay (dari etnis Han) di Belu NTT*”, *Kompas online*, 2 Januari 2019, diakses dari <https://www.kompasiana.com/1b3las-mk/5c2c181a6ddcae0af843a747/mencermati-para-tokoh-bermarga-lay-dari-etnis-han-di-belu-ntt?page=all>, pada 1 Juli 2019.
- Moleong, L. J.(2001), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pamungkas, S.(2011), *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism (IDW).
- Paramita, S.(2016), “*Komunikasi Politik dan Demokrasi Etnis Tionghoa*

- dalam Pemilu 2014*”, Proceeding Konferensi Nasional Komunikasi Politik, Universitas Brawijaya, Malang, diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/303334129>, pada 15 September 2019.
- Purcell, V.(1987), *The Chinese in Southeast Asia*, London: Oxford University.
- Ritzer, G. & Smart, B.(2011), *Handbook Teori Sosial*. Translation: Derta Sri Widowatie, Bandung: Nusa Media.
- Rohi, R.(2015), “*Nusa Tenggara Timur: Politik Patronase, Klientelisme, dan Pembajakan Kepercayaan Sosial*”, in Edward, A. & Sukmajati, M. (eds.), *Politik Uang Di Indonesia Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, pp. 457-485, Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Satya, M. & Maftuh, B.(2016), “*Strategi Masyarakat Etnis Tionghoa dan Melayu Bangka dalam Membangun Interaksi Sosial untuk Memperkuat Kesatuan Bangsa*”, e-journal Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial (JPIS), Vol. 25 No. 1, pp. 10-23, diakses dari <https://www.google.com/search?s>afe=strict&ei=zfX5XOPAGsX7vASl8liYDg&q=penelitian+diskriminasi+politik+etnis+tionghoa+di+Indonesia+jurnal+pdf&oq=penelitian+diskriminasi+politik+etnis+tionghoa+di+Indonesia+jurnal+pdf&gs_l=psy-ab.3...377071.388870..389233...0..0.0.208.3734.0j23j1.....0....1..gws-wiz.....0i71j33i21j33i160j33i10.czsigtq9vG8 , pada 2 Juli 2019.
- Suharyanto, A.(2014), “Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 2, No. 2, pp. 151-160.
- Suryadinata, L.(2003), “*Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?*”, e-journal Antropologi Indonesia, Vol. 71, diakses dari <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/download/3464/2744>, pada 1 Oktober 2019.
- Winengan.(2018), “*Local Political Democratization Policy: Voter Participation in the Direct Regional Head Election*”, e-journal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP), Vol. 22 No. 1,

Jurnal MODERAT, Volume 6, Nomor 2

Website: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>

Submitted 1 Mei 2020, Reviewed 17 Mei 2020, Publish 31 Mei 2020

ISSN: 2442-3777 (cetak)

ISSN: 2622-691X (online)

pp. 61-73.
10.22146/jsp.31222.

doi: Yin, R, K.(2002), *Case Study Research
Design and Methods*.
Translation: Mudzakir, Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.